

BAB II

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh tekanan *stakeholder* terhadap *sustainability report disclosure* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suharyani et al., (2019) yang memperoleh hasil bahwa tekanan *stakeholder* berpengaruh positif signifikan terhadap *sustainability report disclosure*. Namun hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriani et al., (2023) yang memperoleh hasil bahwa tekanan *stakeholder* tidak berpengaruh signifikan terhadap *sustainability report disclosure*. Sama halnya dengan penelitian oleh Darmawan & Sudana (2022). Hasil dari penelitian yang mereka lakukan menunjukkan tekanan karyawan dan tekanan pemegang saham tidak berpengaruh pada *sustainability report disclosure* dan tekanan konsumen berpengaruh negatif pada *sustainability report disclosure*.

Begitu pula untuk penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris independen terhadap *sustainability report disclosure*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ramantha (2021) dengan hasil yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *sustainability report disclosure*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto (2022) dan penelitian oleh Andriani et al., (2023) yang memperoleh hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*.

Sama halnya dengan penelitian mengenai komite audit terhadap *sustainability report disclosure*. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Ramantha (2021) yang memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh positif pada *sustainability report disclosure*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto (2022) dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report disclosure*.

B. Teori dan Kajian Pustaka

1. Teori Stakeholders

Teori *stakeholder* pertama kali dikemukakan oleh Freeman pada tahun 1984. Suatu teori yang mendasarkan hak setiap pihak yang terlibat dalam perusahaan untuk memperoleh informasi mengenai operasional perusahaan yang dapat menjadi dasar bagi keputusan mereka disebut sebagai teori *stakeholder* (Sriningsih & Wahyuningrum, 2022). Pandangan teori ini menekankan perlunya perusahaan untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dengan perusahaan tersebut (Sofa & Respati, 2020).

Salah satu wujud dari pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah penerbitan laporan keberlanjutan. Tekanan untuk mengungkapkan laporan ini salah satunya berasal dari partisipasi para pemangku kepentingan atau *stakeholder*. Mereka mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial yang sejalan dengan kebutuhan pemangku kepentingan (Qisthi & Fitri, 2020). Melalui laporan keberlanjutan ini, perusahaan dapat menyajikan informasi yang komprehensif tentang aktivitas mereka dan dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan aspek sosial (Alfaiz & Aryati, 2019).

Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan dari semua pihak yang memiliki kepentingan terkait. Oleh karena itu, kegiatan perusahaan harus mempertimbangkan persetujuan dari pemangku kepentingan, karena manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab moral terhadap mereka (Damayanti & Hardiningsih, 2021). Oleh sebab itu, teori *stakeholder* menjadi landasan teoritis utama dalam menganalisis dampak tekanan *stakeholder*, seperti tekanan lingkungan, tekanan karyawan, tekanan konsumen, dan tekanan pemegang saham terhadap *Sustainability Report Disclosure (SRD)*.

2. Teori Agensi

Teori agensi (teori keagenan) pertama kali diungkapkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori agensi merujuk pada hubungan yang dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua pihak dalam suatu perusahaan, yaitu prinsipal

dan agen, yang merupakan kunci utama dalam perusahaan (Wardoyo et al., 2021). Inti dari teori ini adalah adanya hubungan keagenan di mana prinsipal menugaskan tugas kepada agen, dan hubungan ini diatur oleh kontrak yang disepakati (Kurniawansyah et al., 2018).

Teori agensi mencoba mengatasi masalah keagenan yang timbul karena adanya tujuan yang berbeda antara pihak-pihak yang bekerja sama dalam sebuah perusahaan. Dalam konteks ini, agen memiliki motivasi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal yang seringkali mengakibatkan konflik antara keinginan atau tujuan agen dan prinsipal (Wardoyo et al., 2021). Masalah keagenan yang sering muncul seringkali disebabkan oleh manajemen yang tidak mampu memberikan pertanggungjawaban yang memadai terhadap kepercayaan yang diberikan oleh prinsipal, dengan memberikan laporan yang terlihat baik tetapi hanya menguntungkan pihak manajemen.

Teori agensi memberikan suatu metode untuk menyelaraskan tujuan antara agen dan prinsipal dengan menggunakan alat yang diharapkan dapat membantu mengurangi ketidakpastian prinsipal terhadap kondisi perusahaan, yaitu mekanisme pelaporan informasi perusahaan (Wardoyo et al., 2021). Oleh karena itu, teori agensi menjadi kerangka teoritis utama dalam mempertimbangkan pengaruh dewan komisaris independen dan komite audit terhadap *Sustainability Report Disclosure (SRD)*. Tata kelola perusahaan yang efektif, terutama melalui pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dan komite audit, akan mendorong manajemen untuk menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih lengkap pengungkapannya, karena laporan tersebut merupakan sarana untuk menyampaikan informasi secara komprehensif demi menghindari terjadinya asimetri informasi antara agen dan prinsipal.

3. Sustainability Report Disclosure

a. Pengertian Sustainability Report

Sustainability report atau laporan keberlanjutan adalah suatu bentuk pengukuran, pengungkapan, dan upaya akuntabilitas atas kinerja perusahaan dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Laporan ini menjadi bukti konkret dari kontribusi dan perhatian perusahaan terhadap masyarakat melalui tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta menjadi penghubung antara kebutuhan para pemangku kepentingan (Suharyani et al., 2019).

Sustainability report memiliki sifat transparan dalam mengungkapkan ketiga aspek tersebut, dan dengan demikian juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Nurumina et al., 2020). Konsep keberlanjutan bertujuan untuk mendorong perilaku yang bertanggung jawab daripada sekadar menghindari tindakan yang salah. Laporan ini menjadi bukti nyata atas komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan di sekitarnya (Wulanda et al., 2017).

b. GRI (Global Reporting Initiative)

Peran *Global Reporting Initiative (GRI)* dalam praktik bisnis di sektor pemerintahan adalah membantu dalam komunikasi mengenai dampaknya terhadap isu-isu keberlanjutan yang krusial seperti Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan sosial, tata kelola, dan perubahan iklim. Standar GRI terus diperbarui sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 2000, dengan edisi terakhir yang dirilis adalah GRI-G4. Dimensi-dimensi dalam GRI-G4, yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, masih sesuai dengan panduan GRI sebelumnya, yaitu GRI-G3. GRI-G4 telah menjadi standar yang banyak digunakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia (Widyastuti & Wijayanti, 2022)

Tingkat pengungkapan *sustainability report* setiap perusahaan dapat bervariasi dari satu periode ke periode berikutnya karena pengungkapan laporan tersebut masih bersifat sukarela. Oleh karena itu, diperlukan analisis berdasarkan indikator yang terdapat dalam GRI G4 untuk menilai tingkat pengungkapan GRI-

G4. Penelitian ini menggunakan GRI-G4 sebagai standar khusus untuk pengungkapan, yang mencakup total 91 item indikator yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial (Widyastuti & Wijayanti, 2022).

c. Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut standar GRI-G4, perusahaan memiliki dua pilihan dalam menyusun *sustainability report*, yaitu opsi inti dan opsi komprehensif. Opsi inti mencakup elemen-elemen dasar dari *sustainability report*, termasuk dasar pengungkapan organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial, serta kinerja tata kelola. Di sisi lain, opsi komprehensif, yang berlandaskan pada opsi inti, mengharuskan pengungkapan tambahan mengenai strategi dan analisis, tata kelola, etika, dan integritas sosial. Selain itu, perusahaan juga wajib melaporkan semua indikator terkait aspek material yang telah diidentifikasi secara lebih rinci. (Alfaiz & Aryati, 2019).

Adapun dalam hal pengungkapan, terdapat dua jenis pengungkapan *sustainability report*, yaitu pengungkapan standar umum dan pengungkapan standar khusus. Pengungkapan standar umum meliputi strategi dan analisis, profil perusahaan, aspek material dan batasan yang teridentifikasi, hubungan dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Sementara itu, pengungkapan standar khusus mencakup pendekatan manajemen dan indikator yang mencakup kategori ekonomi, lingkungan, dan sosial. (GRI, 2013).

4. Tekanan *Stakeholder*

Stakeholder merupakan salah satu bagian penting dalam struktur perusahaan, dan keberadaan mereka sangatlah vital. *Stakeholder* merujuk pada kelompok individu atau entitas organisasi yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasi perusahaan, karena tanpa dukungan dari *stakeholder*, perusahaan tidak dapat berfungsi secara efektif. Perusahaan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga reputasinya sebagai entitas yang kredibel. Oleh karena itu,

stakeholder memiliki kemampuan untuk mengawasi aktivitas perusahaan dan mendorong pengungkapan informasi.

Penerbitan *sustainability report* diyakini dapat meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* dan memperkuat kerjasama jangka panjang antara perusahaan dan *stakeholder*. Perusahaan yang memiliki reputasi tanggung jawab sosial yang baik juga cenderung membangun hubungan yang positif dengan *stakeholder* eksternal. Meskipun setiap perusahaan mungkin mengalami tekanan dari *stakeholder* yang berbeda-beda tergantung pada industri tempat mereka beroperasi, tekanan tersebut dapat mendorong peningkatan pengungkapan laporan keberlanjutan. Dalam konteks penelitian ini, *stakeholder* yang dipertimbangkan meliputi lingkungan, karyawan, konsumen, dan pemegang saham.

a. Tekanan Lingkungan

Lingkungan merupakan wilayah atau masyarakat di mana suatu perusahaan beroperasi. Kinerja lingkungan suatu perusahaan tercermin dari aktivitas operasionalnya dan dampaknya terhadap lingkungan, termasuk pengelolaan limbah, emisi gas karbon, dan perubahan iklim (Widyastuti & Wijayanti, 2022).

Saat menjalankan aktivitas operasional, perusahaan berupaya memaksimalkan sumber daya dan mengurangi biaya. Salah satu sumber daya terpenting yang digunakan adalah kekayaan alam dan lingkungan, yang perlu dilestarikan untuk menjaga keseimbangan lingkungan (Aziza & Sukoharsono, 2021). Namun, hingga saat ini, perusahaan seringkali mengabaikan masalah lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Lingkungan adalah pemangku kepentingan utama bagi perusahaan yang aktivitasnya berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, digunakan pengukuran *dummy* untuk mengukur tekanan lingkungan. Dalam industri pertanian, pertambangan, kimia, mesin, suku cadang kendaraan bermotor dan komponen, kabel, properti, perumahan, konstruksi, energi, jalan raya, lapangan udara, pelabuhan, transportasi, pembangunan non-bangunan, dan industri

elektronik, diberikan nilai 1, sedangkan industri lainnya diberikan nilai 0 (Widyastuti & Wijayanti, 2022).

b. Tekanan Karyawan

Karyawan merupakan aset utama perusahaan yang berperan sebagai subjek dalam aktivitas perusahaan. Dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dari perspektif masyarakat, perusahaan berupaya memastikan pemenuhan kewajibannya kepada *stakeholder* agar tidak mendapat kritik atau hukuman. Di bawah tekanan karyawan, perusahaan dapat mengimplementasikan strategi pembangunan berkelanjutan dan menjadikannya tanggung jawab sosial (Qomariah, 2021).

Banyaknya jumlah karyawan memberikan indikasi bahwa sebuah organisasi memiliki tenaga kerja yang memadai dan profesional, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawabnya, termasuk terkait dengan penerbitan *sustainability report*. Dalam penelitian ini, variabel karyawan diukur dengan total jumlah karyawan dalam perusahaan. Jumlah karyawan dalam sebuah perusahaan dapat menjadi faktor yang mendorong perusahaan untuk menerbitkan *sustainability report* dan meningkatkan pengungkapannya.

c. Tekanan Konsumen

Perusahaan yang memperhatikan kebutuhan konsumennya menunjukkan minat dalam mengelola tanggung jawab sosial. Dengan demikian, perusahaan mendapatkan kepercayaan masyarakat dan reputasinya pun meningkat (Qomariah, 2021). Kepercayaan konsumen dapat diartikan sebagai komitmen untuk menggunakan barang atau jasa perusahaan secara konsisten. Komitmen tersebut terbentuk melalui keuntungan yang diberikan oleh perusahaan dan kebutuhan akan informasi mengenai kinerja sosial perusahaan.

Dalam penelitian ini, tekanan dari konsumen diukur menggunakan metode *dummy* karena setiap perusahaan memiliki klasifikasi industri yang berbeda-beda terkait dengan konsumennya. Untuk industri-industri seperti perawatan kesehatan, barang ritel, barang konsumsi, tekstil dan garmen, alas kaki, jasa keuangan,

investasi, restoran, hotel dan wisata, percetakan, periklanan, media, industri telekomunikasi, dan energi 1, sementara untuk industri lainnya diberikan nilai 0.

d. Tekanan Pemegang Saham

Dengan menyajikan *sustainability report* pada pertemuan pemangku kepentingan publik, pemegang saham memiliki dampak yang signifikan pada pengambilan keputusan manajemen yang tidak hanya terkait dengan isu sosial, tetapi juga keputusan investasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Ernst dan Young (EY) dalam Survey Investor Global tahun 2015, investor menyadari bahwa mereka hanya memperoleh informasi keuangan yang terbatas dari perusahaan. Situasi ini mendorong investor untuk memperjuangkan transparansi dalam laporan keberlanjutan perusahaan, yang merupakan salah satu faktor kunci yang memengaruhi pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, laporan non-keuangan sering menjadi dasar dalam pengambilan keputusan investor (Yudhanti & Listianto, 2021).

Karena itu, para pemegang saham membutuhkan informasi non-keuangan, seperti laporan keberlanjutan, untuk mengevaluasi keberlanjutan perusahaan sebelum mereka membuat keputusan investasi. Dalam penelitian ini, tekanan pemegang saham diukur berdasarkan tingkat konsentrasi kepemilikan, dengan cara membandingkan jumlah saham yang dipegang induk perusahaan dengan total keseluruhan saham yang beredar.

5. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah individu yang tidak memiliki hubungan dengan pihak mana pun dalam manajemen perusahaan. Karena mereka tidak memiliki hubungan bisnis atau keluarga dengan manajemen perusahaan, mereka dapat memberikan pengawasan yang objektif dan tidak bias. Dewan komisaris independen cenderung lebih fokus pada kepatuhan terhadap standar etika dan transparansi, sehingga mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih akurat, jujur, dan lengkap mengenai dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka. Dengan demikian, keberadaan dewan komisaris

independen membantu memastikan bahwa *sustainability report* yang dibuat perusahaan lebih dapat dipercaya dan bermanfaat bagi para *stakeholder*. Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan.

6. Komite Audit

Komite audit adalah sebuah badan profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan pengawas dengan tujuan untuk mendukung dan memperkuat fungsi pengawasan dewan komisaris. Tujuan utama dari pembentukan komite audit adalah untuk mengawasi proses pembuatan laporan keuangan dan audit, mengendalikan pelaksanaan tata kelola perusahaan, serta melakukan pengawasan independen terhadap pengelolaan dan pengendalian risiko dalam penyusunan akuntansi dan pelaksanaan audit (Widyastuti & Wijayanti, 2022).

Semakin banyak jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan, diharapkan akan semakin banyak rekomendasi yang diberikan oleh anggota komite audit, sehingga dapat mengungkapkan informasi-informasi yang berguna untuk pengungkapan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, ukuran yang lebih besar pada komite audit dapat meningkatkan keahlian dan keberagaman yang ada dalam komite audit, serta cenderung memberikan otoritas yang lebih tinggi dan sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Ukuran yang besar pada komite audit membawa lebih banyak pengalaman, keahlian, keragaman pandangan, dan keterampilan untuk memastikan pemantauan yang efisien (Setiawan & Ridaryanto, 2022). Dalam penelitian ini, pengukuran dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi komite audit dalam perusahaan.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Tekanan *Stakeholders* terhadap *Sustainability Report Disclosure*

Tekanan dari beragam pihak, termasuk lingkungan, karyawan, konsumen, dan pemegang saham, mendorong perusahaan untuk meningkatkan keterbukaan

dalam melaporkan keberlanjutan mereka. Masyarakat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan tanggung jawab dalam praktik bisnis mereka, maka perusahaan harus lebih terbuka dalam pelaporan, maka informasi yang disampaikan lebih akurat dan terpercaya. Para karyawan yang menuntut praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan transparan dapat mendorong perusahaan untuk memperbaiki pengungkapan *sustainability report* karena karyawan yang puas dan terlibat cenderung meningkatkan reputasi dan kinerja perusahaan, maka perusahaan berupaya memenuhi harapan mereka, maka laporan yang lebih akurat dan informatif dihasilkan. Sama halnya dengan konsumen, jika mereka menyadari bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan dikelola dengan baik oleh perusahaan, mereka cenderung memilih produk perusahaan tersebut, hal tersebut kemudian akan mendorong perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif, agar dapat mempertahankan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Begitu juga dengan pemegang saham, perusahaan dengan tekanan pemegang saham yang tinggi cenderung memiliki tingkat keterbukaan pelaporan keberlanjutan yang tinggi, karena menandakan adanya tekanan dari pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dengan meningkatkan tingkat keterbukaan pelaporan mereka.

Tekanan *stakeholder* memiliki pengaruh besar terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan karena sesuai dengan prinsip utama dari teori *stakeholder*. Teori ini menekankan bahwa organisasi harus memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh operasi perusahaan, termasuk karyawan, konsumen, investor, komunitas lokal, dan lainnya. Dengan menyadari pentingnya mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh operasi perusahaan, perusahaan merasa perlu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pengungkapan yang lebih rinci dalam laporan keberlanjutan, dengan tujuan untuk menjaga legitimasi, reputasi, dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suharyani et al., (2019) menyatakan bahwa tekanan pemangku kepentingan berpengaruh positif signifikan terhadap

pengungkapan laporan keberlanjutan. Dimana lingkungan, konsumen, pekerja dan investor dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan *sustainability report* yang lebih berkualitas dan bernilai bagi masyarakat luas. Tekanan dari *stakeholder* yang tinggi membuat perusahaan berusaha melakukan tanggung jawab sosialnya dan mengungkapkannya dengan lebih transparan demi keberlangsungan hidup perusahaan jangka panjang. Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sudana (2022) memperoleh hasil bahwa tekanan lingkungan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *sustainability report*, tekanan karyawan dan tekanan pemegang saham tidak berpengaruh pada *sustainability report* dan tekanan konsumen berpengaruh negatif pada *sustainability report*.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan *Stakeholders* berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report Disclosure*

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap *Sustainability Report Disclosure*

Dewan komisaris independen tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan dan tidak memiliki kepentingan pribadi, mereka bisa memberikan pandangan yang lebih objektif dan fokus pada kepentingan semua pemangku kepentingan. Melalui peran mereka yang proaktif dan bertanggung jawab, dewan komisaris independen dapat memperkuat tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta menghasilkan laporan keberlanjutan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya.

Teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dewan komisaris independen, yang tidak memiliki hubungan bisnis atau kepentingan pribadi dengan perusahaan, lebih cenderung bertindak objektif dan tidak bias. Mereka memastikan bahwa perusahaan menerapkan praktik tata kelola yang baik dan memenuhi kewajiban transparansi,

termasuk dalam pengungkapan keberlanjutan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, perusahaan lebih mungkin mengungkapkan informasi keberlanjutan yang jujur dan lengkap, meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas laporan keberlanjutan perusahaan.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suharyani *et al.*, (2019) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Perusahaan dengan dewan komisaris independen yang tinggi dapat menjamin pengendalian serta mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan *sustainability report* lebih lengkap. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekaputri & Eriandi (2022), penelitian ini gagal menemukan adanya pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report Disclosure*.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Sustainability Report Disclosure*

Komite audit juga memainkan peran penting dalam meningkatkan *sustainability report disclosure* karena tanggung jawabnya dalam memastikan perusahaan mematuhi aturan, mengelola risiko, dan mengevaluasi informasi. Mereka juga berinteraksi dengan investor dan regulator yang semakin menuntut transparansi. Dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, komite audit mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan laporan ini.

Teori agensi menekankan pentingnya hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen (agen), di mana komite audit berperan sebagai perantara yang memastikan bahwa kepentingan pemilik terjaga dengan baik. Komite audit membantu mengurangi konflik keagenan dengan memastikan keakuratan informasi dalam laporan keberlanjutan dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal. Melalui fungsi-fungsinya ini,

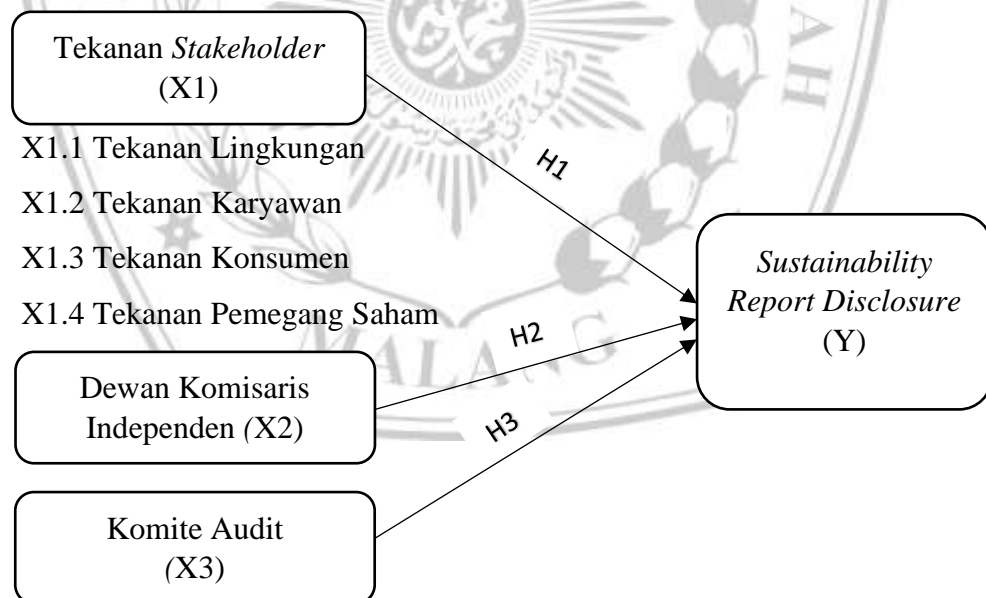
komite audit berperan dalam memelihara hubungan yang sehat antara manajemen dan pemilik, yang sesuai dengan prinsip-prinsip teori agensi.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Suharyani et al., (2019) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Perusahaan dengan komite audit yang tinggi dapat menjamin pengendalian serta mendorong pihak manajemen untuk mengungkapkan *sustainability report* lebih lengkap. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto (2022), penelitian ini gagal menemukan adanya pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *sustainability report*.

Berdasarkan uraian teori tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap *Sustainability Report Disclosure*.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran